



East Java Students' Action as a Form of National Defense: A Case Study of the East Java Action Calling for Justice Against "Indonesia Gelap" in Surabaya

Moh. Feriyanto^{1*}, Ahmad Alaika Kamaludin², Ika Puspita Sari³, Nurun Nisa U Taniah⁴, Deni Tri Laksono⁵

Progam Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Corresponding Author: Moh. Feriyanto mferiyanto67@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Student Action, National Defense, Social Movement, Democracy, Dark Indonesia

Received : 16, August

Revised : 30, August

Accepted: 28, September

©2025 Feriyanto, Kamaludin, Sari, Taniah, Laksono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

The student demonstration in East Java, titled "Seruan Jatim Menggugat: Indonesia Gelap", was a response to the democratic crisis and social injustice felt by society. This study aims to examine how the action reflects the values of patriotism within the framework of civil participation. A descriptive qualitative method with a case study approach was applied. Data were collected through media documentation, field observation, and semi-structured interviews with the action coordinator. The findings show that this demonstration represents a form of non-military patriotism expressed through moral, intellectual, and democratic means. The students acted as the nation's conscience by voicing constructive criticism of government policies. The action also emphasizes that patriotism is not limited to military efforts, but can be realized through the active role of citizens who care about the nation's future.

Aksi Mahasiswa Jawa Timur Sebagai Wujud Bela Negara: Studi Kasus Aksi Seruan Jatim Menggugat "Indonesia Gelap" di Surabaya

Moh. Feriyanto^{1*}, Ahmad Alaika Kamaludin², Ika Puspita Sari³, Nurun Nisa U Taniah⁴, Deni Tri Laksono⁵

Progam Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Corresponding Author: Moh. Feriyanto mferiyanto67@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Aksi mahasiswa, bela negara, gerakan sosial, demokrasi, Indonesia Gelap

Received : 16, August

Revised : 30, August

Accepted: 28, September

©2025 Feriyanto, Kamaludin, Sari, Taniah, Laksono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRAK

Demonstrasi mahasiswa Jawa Timur yang mengusung tema "Seruan Jatim Menggugat: Indonesia Gelap" muncul sebagai bentuk tanggapan terhadap krisis demokrasi serta ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana aksi tersebut merefleksikan nilai bela negara dalam konteks keterlibatan warga sipil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi media, observasi langsung di lapangan, serta wawancara semi-terstruktur dengan koordinator aksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aksi ini merupakan wujud bela negara secara non-militer dengan menempuh jalur moral, intelektual, dan demokrasi. Mahasiswa berperan sebagai suara hati bangsa dengan menyampaikan kritik yang membangun terhadap kebijakan pemerintah. Aksi ini mempertegas bahwa bela negara tidak selalu identik dengan tindakan militer, tetapi juga dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif sebagai warga negara yang peduli pada masa depan bangsanya.

PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun terakhir, demokrasi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius, seperti semakin lemahnya fungsi lembaga pengawas, bertambahnya tindakan represif oleh aparat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemunduran prinsip negara hukum dan semakin sempitnya ruang partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam situasi ini, peran masyarakat sipil menjadi sangat penting sebagai penyeimbang kekuasaan, di mana mahasiswa hadir sebagai kekuatan moral sekaligus aktor sosial-politik bangsa. Sebagai kaum terdidik, mahasiswa memiliki peranan penting tidak hanya dalam memahami kondisi sosial, tetapi juga dalam menjaga tegaknya prinsip-prinsip demokrasi di tanah air. Aksi bertema “Seruan Jatim Menggugat: Indonesia Gelap” yang berlangsung di Surabaya merupakan wujud nyata partisipasi mahasiswa dalam menanggapi persoalan bangsa yang dianggap menyimpang dari nilai keadilan dan demokrasi. Gerakan ini memperlihatkan kesadaran kritis generasi muda akan pentingnya peran aktif dalam urusan kenegaraan. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, era reformasi 1998, hingga masa kini, mahasiswa selalu tampil sebagai penggerak perubahan sosial. Hal ini menegaskan bahwa upaya bela negara tidak selalu berkaitan dengan kekuatan militer, melainkan dapat diwujudkan melalui kontribusi moral dan intelektual dalam menjaga persatuan bangsa. Aksi demonstrasi yang lahir dari rasa cinta tanah air dan tekad memperjuangkan keadilan merupakan contoh nyata dari upaya bela negara dalam kerangka sipil.

Rumusan Masalah

Bagaimana aksi “Seruan Jatim Menggugat” dapat dimaknai sebagai bentuk bela negara dalam konteks sosial dan politik Indonesia?

Tujuan

Untuk menganalisis makna aksi mahasiswa sebagai bagian dari bela negara serta peran mereka dalam menjaga prinsip demokrasi.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bahwa bela negara bukan hanya tugas militer, tetapi juga tanggung jawab sipil melalui keterlibatan aktif dalam menjaga keadilan dan demokrasi.

PELAKSAAN

Bela Negara

Pada dasarnya, bela negara dapat diartikan sebagai usaha untuk menjaga, memelihara, merawat, melindungi dari berbagai ancaman, serta berpihak dalam rangka mempertahankan sesuatu, sebagaimana definisi kata bela dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang dimaksud untuk dilindungi adalah negara beserta seluruh tumpah darahnya. Konsep bela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Artinya, bela negara merupakan hak sekaligus

kewajiban konstitusional bagi seluruh warga Indonesia. Lebih jauh, makna bela negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Gerakan Sosial Baru (New Social Movement Theory)

Teori ini mulai muncul dan berkembang pada dekade 1970-an melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Alain Touraine dan Jürgen Habermas. Berbeda dengan teori gerakan sosial tradisional yang cenderung menitikberatkan pada konflik kelas dan masalah ekonomi, Gerakan Sosial Baru lebih menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai, identitas, budaya, hak asasi manusia, dan demokrasi. Gerakan Sosial Baru merupakan salah satu bentuk perkembangan dari gerakan sosial itu sendiri. Ciri khas yang membedakannya dengan gerakan sosial lama adalah tidak lagi berfokus pada ideologi yang kental, seperti yang tampak pada gerakan antikapitalisme, perjuangan kelas, maupun revolusi kelas (PRASETYA, 2019).

Gerakan Sosial Baru menolak anggapan bahwa setiap perjuangan dan pembentukan kelompok harus selalu didasarkan pada konsep kelas. Pola organisasinya juga berbeda, tidak lagi meniru model serikat buruh industri ataupun struktur politik partai. Sebaliknya, Gerakan Sosial Baru cenderung membangun hubungan di luar jalur politik formal, memanfaatkan taktik-taktik yang bersifat mengganggu (disruptif), dan berupaya menggerakkan opini publik guna memperkuat daya tawar politik mereka. Anggota gerakan ini berasal dari latar belakang sosial yang beragam, dengan identitas seperti gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga kelas sosial. Mereka tidak hanya berasal dari kelompok tertentu seperti buruh, petani, atau proletar sebagaimana gerakan sosial lama yang umumnya digerakkan kelompok marginal. Pelaku Gerakan Sosial Baru berjuang melintasi batas-batas sosial demi kepentingan bersama yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan (PRASETYA, 2019).

Gerakan Sosial Baru yang diungkapkan oleh (Budiarjo, 2010) yaitu pada dasarnya berlandaskan pada semangat protes. Gerakan ini menunjukkan sikap kritis terhadap praktik politik para birokrat dan merasa terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Mereka mendorong desentralisasi kekuasaan negara dan pemerintah, serta menekankan pentingnya partisipasi dalam mengembangkan kemandirian masyarakat, khususnya di tingkat lokal. Salah satu tujuan utama gerakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini dilakukan, antara lain, melalui pembentukan kelompok-kelompok yang peduli pada isu-isu kontemporer seperti lingkungan hidup, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan gerakan antinuklir. Gerakan ini juga menonjolkan kebebasan dalam bentuknya, tanpa struktur organisasi yang kaku, tidak birokratis, dan bersatu karena memiliki tujuan atau isu perjuangan yang sama. Gerakan Sosial Baru berupaya membangun identitas politik tersendiri bagi para anggotanya, dengan fokus menekan pemerintah agar lebih peduli terhadap isu-isu di luar kepentingan material.

Gerakan Sosial Baru lahir sebagai bentuk reaksi terhadap proses modernisasi dan industrialisasi, dengan menitikberatkan perjuangan pada nilai-nilai simbolik. Ruang publik menjadi wadah penting bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dalam sistem yang demokratis. Dalam hal ini, mahasiswa berperan sebagai aktor utama yang mengangkat isu-isu seputar keadilan, transparansi, serta penegakan hukum melalui aksi-aksi damai dan sarat makna simbolik, seperti yang terlihat dalam aksi “Seruan Jatim Menggugat: Indonesia Gelap”.

Partisipasi Sipil

Participation Theory atau Teori Partisipasi mengacu pada gagasan dalam ilmu sosial dan politik yang menjelaskan bagaimana warga negara mengambil peran aktif dalam kehidupan publik dan proses demokrasi, tidak terbatas hanya pada partisipasi formal seperti pemilihan umum. Teori ini menjadi dasar untuk memahami keterlibatan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam memengaruhi arah kebijakan, mengawasi jalannya kekuasaan, dan memperjuangkan hak-hak sipil secara kolektif. Teori ini menekankan pentingnya keberadaan masyarakat sipil yang aktif serta terbangunnya jejaring sosial demi tercapainya kesejahteraan bersama (Maritza & Taufiqurokhman, 2024). Selain itu, teori ini juga menyoroti arti penting hubungan yang berkelanjutan, seperti keberadaan asosiasi dan kelompok, dalam memperkuat kohesi sosial yang pada akhirnya membawa dampak positif, misalnya menurunnya angka kriminalitas, membaiknya kesehatan, dan meningkatnya kesejahteraan ekonomi. Secara umum, partisipasi sipil dapat diartikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas sosial dan politik, baik dengan memilih pemimpin, maupun dengan cara langsung atau tidak langsung memengaruhi arah kebijakan pemerintah. Bentuk partisipasi ini mencakup memberikan suara saat pemilu, menghadiri rapat umum, melakukan pendekatan atau lobi kepada pejabat pemerintah atau anggota legislatif, menjadi anggota partai politik, hingga bergabung dalam gerakan sosial yang mengedepankan aksi langsung (Lutfiana & Widiyanto, 2018).

Peran Mahasiswa

Mahasiswa merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kewajiban untuk berperan dalam upaya bela negara, selaras dengan posisinya sebagai agen perubahan sekaligus agen pembangunan. Kegiatan bela negara penting dilakukan mahasiswa sebagai sarana pembentukan karakter, penguatan mental, dan persiapan menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan narkoba, paham radikalisme, bencana alam, konflik di antara mahasiswa, serta penyebaran penyakit menular. Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan mampu mengoreksi berbagai hal yang kurang tepat di lingkungannya agar sejalan dengan harapan bersama. Diharapkan pula, mahasiswa kelak dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilannya untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik.

Selain itu, mahasiswa juga memiliki peran sebagai social control atau pengendali sosial. Dalam peran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dinamika sosial serta ikut mengelolanya. Artinya, mahasiswa tidak hanya dituntut unggul di bidang akademik, tetapi juga harus cakap bersosialisasi dan

peka terhadap kondisi di sekitarnya. Mahasiswa dituntut mampu mengkritisi, memberi masukan, dan menyarankan solusi ketika kehidupan sosial masyarakat sudah menyimpang dari cita-cita dan tujuan nasional.

Mahasiswa juga bertindak sebagai *guardian of value* atau penjaga nilai-nilai luhur. Sebagai penjaga nilai, mahasiswa memikul tanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai positif bangsa. Dalam hubungannya dengan pemerintah, mahasiswa menjalankan fungsi kontrol politik dengan mengawasi, menilai, dan mengkritisi berbagai kebijakan dan keputusan yang dibuat. Mahasiswa juga menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan analisis permasalahan yang tepat, mahasiswa diharapkan mampu menyuarakan kenyataan yang terjadi di lapangan disertai dengan solusi yang ilmiah dan bertanggung jawab (Juwita, 2022).

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai aksi mahasiswa Jawa Timur yang dipandang sebagai bentuk nyata dari sikap bela negara. Studi ini mengambil fokus pada Aksi Seruan Jatim Menggugat bertajuk "Indonesia Gelap" yang berlangsung di Surabaya. Data dikumpulkan melalui dokumentasi visual, penelusuran media daring, serta wawancara mendalam yang dilaksanakan beberapa bulan setelah aksi dilakukan. Wawancara melibatkan 15 mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura yang terlibat langsung dalam aksi tersebut. Pedoman wawancara bersifat semi-terstruktur dan mencakup 11 pertanyaan utama yang dirancang untuk menelusuri latar belakang, motivasi, serta refleksi kritis para peserta. Beberapa pertanyaan mencakup: "Apa alasan utama di balik pelaksanaan aksi ini?", "Mengapa tema 'Indonesia Gelap' diangkat dan apa makna simbolis di baliknya?", "Apa saja tuntutan konkret yang diajukan dalam aksi ini?", serta "Bagaimana proses konsolidasi mahasiswa lintas kampus di Jawa Timur hingga dapat menyatukan gerakan ini?". Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti mengeksplorasi tidak hanya aspek peristiwa, tetapi juga nilai-nilai, simbolisme, dan strategi kolektif yang muncul. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik dengan cara mengidentifikasi pola dan tema dari narasi para informan. Kajian ini juga menelaah keterkaitan antara pengalaman individual mahasiswa dengan dinamika sosial dan politik yang memicu aksi tersebut, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana bentuk partisipasi mahasiswa dalam aksi dianggap sebagai ekspresi bela negara di tengah iklim demokrasi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Aksi Mahasiswa dalam "Seruan Jatim Menggugat Aksi yang berlangsung di depan Gedung Negara Graha, Surabaya, diikuti oleh ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. Para mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Jatim Menggugat melakukan demonstrasi dengan tema Seruan Aksi Indonesia Gelap #JatimMenggugat di depan Gedung DPRD Jawa Timur. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Ketua DPRD Jawa Timur segera menghubungi Ketua DPR RI atau Presiden sebagai bentuk nyata komitmen untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Aksi ini

merupakan bentuk protes atas kinerja lebih dari 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap mengecewakan serta tidak memihak kepentingan rakyat. Baik elemen mahasiswa maupun masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jatim Menggugat mendesak agar pemerintahan saat ini dievaluasi secara menyeluruh, sekaligus menyatakan sikap diantaranya:

1. Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
2. Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak, seperti tunjangan kinerja dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.
3. Menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
4. Menolak penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di lingkungan kampus yang berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi perguruan tinggi serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.
5. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 288 A ayat 1, Karena berpotensi membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja legislatif serta melemahkan prinsip demokrasi.
6. Menolak Rencana Revisi UU KUHAP dan UU Kejaksaan agar tidak menciptakan tumpang tindih hukum dalam proses peradilan serta mencegah terjadinya "absolute power" Kejaksaan karena adanya pelebaran wewenang Kejaksaan dalam peradilan perkara.
7. Menuntut kejelasan dan evaluasi keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus menuntut untuk evaluasi anggaran pemerintah di kwartai pertama.
8. Wujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat, termasuk Surabaya Waterfront Land. Cabut Hak Guna Bangunan (HGB) Ilegal di beberapa daerah Jawa Timur.
9. Melakukan evaluasi terhadap instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga adanya peraturan turunan dari inpres tersebut.
10. Hapuskan manufungsi TNI/ POLRI dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita Reformasi Indonesia.

Para mahasiswa tersebut menuntut Ketua DPRD Jawa Timur untuk keluar dan menemui mereka serta menandatangani surat tuntutan kemudian membacakan 10 point tuntutan di depan aksi juga menyampaikannya ke Presiden dan DPR RI via telepon. Namun keinginan tersebut tidak di wujudkan oleh ketua DPRD Jatim, Musyafak. Lantaran ia mengaku tidak memiliki nomor yang bersangkutan.

Meski begitu, pihak DPRD Jatim berjanji akan mengunggah tuntutan tersebut melalui akun Instagram resmi mereka, @dprdjatim. Mahasiswa sempat berupaya bernegosiasi, namun tidak membuahkan hasil. Situasi ini semakin memanas karena Ketua DPRD Jatim memilih turun dari mobil komando. Ketua

BEM Unair, Aulia Thaariq, menyatakan, “Berdasarkan pengalaman aksi-aksi sebelumnya, setelah tanda tangan dilakukan, biasanya aksi berakhir begitu saja tanpa tindak lanjut. Oleh karena itu, karena ribuan massa sudah hadir di sini, kami ingin melihat secara langsung bagaimana DPRD Jatim bersinergi dengan mahasiswa dengan menghubungi DPR RI agar 10 tuntutan kami disampaikan dan benar-benar dipertimbangkan.” Kejadian ini akhirnya memicu keributan antara peserta aksi dan aparat, karena mahasiswa merasa kecewa dengan sikap Ketua DPRD yang dianggap tidak responsif.



WKUTM – Ribuan mahasiswa

Figure 1. Aksi Aliansi Jatim

(<https://surabaya.times.co.id/news/berita/dwFYZazLm/Jatim-Menggugat-Soroti-Kebijakan-100-HariKerja-Presiden-Prabowo-Demo-Berlangsung-Ricuh>)

Berbagai poster bernada kritik keras turut menghiasi jalannya aksi demonstrasi. Slogan-slogan seperti “Anggaran Dipangkas, Rakyat Tertindas” dan “Makan Gratis Dibayar Krisis” mencerminkan sindiran terhadap kebijakan makan siang gratis yang dinilai memberi beban berat terhadap keuangan negara. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga, Aulia Thaariq Akbar, menyatakan bahwa aksi tersebut membawa sepuluh poin tuntutan utama. “Kami menyuarakan penolakan terhadap pemangkasan anggaran, mendesak pemenuhan hak-hak dosen yang hingga kini belum jelas, serta meminta pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena dinilai merugikan rakyat,” ungkapnya. Selama lebih dari satu jam massa menyampaikan orasi, namun tak ada satu pun perwakilan dewan yang menemui mereka. Hal ini memicu kekecewaan peserta aksi, yang kemudian membakar ban dan spanduk sebagai bentuk protes, hingga asap hitam mengepul dan membumbung di langit kota Surabaya (<https://www.forma-surabaya.com/10-tuntutan-demo-mahasiswa-di-jatim-tak-mendapat-reson-yang-memuaskan-aksi-berujung-ricuh/>).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang merupakan mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura salah satu peserta aksi “Seruan Jatim Menggugat: Indonesia Gelap”, terdapat beberapa temuan penting yang merepresentasikan semangat gerakan sosial baru dalam konteks bela negara. Narasumber menyampaikan bahwa: “Aksi ini kami lakukan karena sudah banyak kekecewaan terhadap pemerintah. Kami merasa suara mahasiswa harus kembali didengar. Ini adalah bentuk peringatan, bukan sekadar demo.” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran kritis mahasiswa terhadap situasi sosial dan politik di Indonesia. Aksi ini bukan bersifat anarkis atau reaktif, melainkan merupakan upaya artikulatif untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan terorganisir. Lebih lanjut, narasumber lain menegaskan: “Kami ingin menunjukkan bahwa mahasiswa masih peduli terhadap kondisi bangsa. Ini bukan hanya tentang listrik padam, tapi tentang banyak kebijakan yang gelap dan tidak transparan.” Pernyataan ini mendukung kerangka Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*), di mana isu yang diperjuangkan bukan semata-mata kepentingan ekonomi, tetapi juga nilai moral, keadilan, dan demokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Habermas bahwa gerakan modern lebih berakar pada tuntutan nilai dan hak sipil. Aksi ini juga mengandung unsur bela negara dalam bentuk non-fisik, yaitu berupa kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Mereka tidak hanya menuntut perubahan, tetapi juga berperan aktif sebagai agen kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut, narasumber lain menegaskan: “Kami ingin menunjukkan bahwa mahasiswa masih peduli terhadap kondisi bangsa. Ini bukan hanya tentang listrik padam, tapi tentang banyak kebijakan yang gelap dan tidak transparan.” Pernyataan ini mendukung kerangka Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*), di mana isu yang diperjuangkan bukan semata-mata kepentingan ekonomi, tetapi juga nilai moral, keadilan, dan demokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Habermas bahwa gerakan modern lebih berakar pada tuntutan nilai dan hak sipil.

Aksi ini juga mengandung unsur bela negara dalam bentuk non-fisik, yaitu berupa kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Mereka tidak hanya menuntut perubahan, tetapi juga berperan aktif sebagai agen kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, aksi ini mencerminkan karakteristik utama dari gerakan sosial baru:

1. Terbentuk secara horizontal dan kolektif
2. Mengangkat isu keadilan dan hak publik
3. Menjadi media ekspresi politik moral anak muda
4. Dilakukan secara damai namun memiliki kekuatan simbolik

Analisis dengan Perspektif Bela Negara

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, konsep bela negara dimaknai sebagai segala sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air serta kesadaran akan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman ini menegaskan bahwa bela

negara tidak harus selalu diwujudkan melalui peran militer atau penggunaan senjata, tetapi juga dapat dilakukan melalui partisipasi aktif dan sikap kritis terhadap berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi. Dalam kerangka tersebut, Aksi "Indonesia Gelap" dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi bela negara dalam ranah non-militer, di mana mahasiswa menyuarkan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Menjadi contoh nyata dari gerakan non militer yakni dengan:

1. Menjaga demokrasi dan kebebasan sipil.
2. Menjadi pengawas moral terhadap kebijakan negara.
3. Mewujudkan solidaritas antar mahasiswa sebagai bentuk partisipasi aktif.

Aksi ini juga sejalan dengan konsep Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) yang tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga perubahan nilai, norma, dan kesadaran masyarakat terhadap keadilan dan hak sipil.

Peran Mahasiswa sebagai Kekuatan Moral Bangsa

Konsep bela negara dipahami sebagai prinsip dasar yang melibatkan semangat patriotisme baik secara individu maupun kolektif demi menjaga keberlangsungan sebuah bangsa. Gagasan ini menegaskan bahwa seluruh warga negara, termasuk kalangan mahasiswa, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk turut berperan aktif. Bela negara tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup kontribusi di sektor non-fisik seperti memperkuat jiwa nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa melalui berbagai bidang kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, institusi pendidikan, hingga ruang-ruang kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang kuat mengenai peran strategis mahasiswa dalam memperbaiki keadaan sosial dan politik, serta mengaitkan nilai-nilai bela negara dengan prinsip-prinsip dasar dalam Pancasila.

Mahasiswa memegang posisi sentral sebagai katalisator perubahan, pengawas sosial, penerus bangsa, kekuatan moral, dan penjaga nilai-nilai luhur. Mereka diharapkan mampu menyuarkan kritik, memberikan saran, dan menawarkan solusi atas berbagai persoalan bangsa, serta memelihara etika dan nilai positif di masyarakat. Dengan kedudukannya yang strategis di antara masyarakat dan pemerintah, mahasiswa diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol politik, menyalurkan aspirasi rakyat, sekaligus menjadi perantara informasi kebijakan pemerintah. Peran vital ini didasari oleh realitas keterbatasan aparat keamanan, wujud terima kasih warga, upaya menciptakan stabilitas, dan pelestarian aset bangsa, sehingga mahasiswa dituntut untuk terus mengembangkan diri dan memiliki kepekaan terhadap krisis guna merumuskan solusi yang tepat. Hal ini sangat relevan dengan pernyataan narasumber dari aksi "Seruan Jatim Menggugat: Indonesia Gelap" yang merasa suara mahasiswa harus kembali didengar sebagai bentuk peringatan dan kepedulian terhadap

kondisi bangsa yang gelap serta tidak transparan, sejalan dengan peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial dan kekuatan moral bangsa dalam konteks bela negara non-fisik.

Mahasiswa sebagai kaum intelektual, dianggap memiliki kapasitas dan kualitas untuk memberikan kontribusi signifikan kepada masyarakat. Berbekal kepedulian sosial dan pemikiran kritis, mahasiswa memiliki potensi untuk memicu reformasi, sehingga mereka diidentifikasi sebagai agen perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, menggarisbawahi bahwa mereka merupakan bagian penting dalam proses transformasi suatu bangsa. Mahasiswa mampu menghadirkan inovasi yang mendorong perubahan, serta berfungsi sebagai pembawa perubahan dari kondisi yang belum diketahui menjadi lebih baik melalui penerapan nilai-nilai positif. Peran ini menjadi krusial mengingat tantangan masa depan yang terus bertambah, termasuk dampak globalisasi.

Mahasiswa memiliki tingkat intelektual yang tinggi dalam berpikir, memecahkan masalah, dan merencanakan tindakan, menjadikan mereka panutan dalam masyarakat. Mereka diharapkan mampu mengembangkan inovasi kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan menjadi penyalur suara masyarakat kepada pemerintah, memastikan keputusan dan hukum selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta suara rakyat. Mahasiswa juga disebut sebagai "Iron Stock" atau aset cadangan dan harapan bangsa di masa depan, yang tidak hanya dituntut menguasai teori, tetapi juga memiliki pengalaman kepemimpinan untuk siap menggantikan generasi sebelumnya. Dengan demikian, mahasiswa memiliki peran multipel sebagai agen perubahan, penjaga nilai, penerus bangsa, kekuatan moral, dan pengontrol sosial, yang harus mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan zaman.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Aksi "Seruan Jatim Menggugat: Indonesia Gelap" di Surabaya merupakan manifestasi nyata dari bela negara non-militer yang dilakukan oleh mahasiswa Jawa Timur. Aksi ini tidak hanya menunjukkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dan kurangnya transparansi, melainkan juga sebuah upaya terorganisir dan damai untuk menyuarakan aspirasi. Dalam konteks ini, mahasiswa berperan sebagai kekuatan moral bangsa, mengawal demokrasi, dan menjaga kebebasan sipil melalui kritik konstruktif terhadap kebijakan negara. Tindakan ini selaras dengan konsep Gerakan Sosial Baru yang berfokus pada isu-isu nilai, moral, keadilan, dan demokrasi, melampaui kepentingan ekonomi semata. Dengan demikian, aksi ini menegaskan bahwa bela negara dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif warga negara yang peduli terhadap masa depan bangsa, bukan semata-mata identik dengan pertahanan militer.

Mahasiswa, sebagai kaum intelektual, memegang posisi strategis sebagai agen perubahan, pengontrol sosial, dan penjaga nilai-nilai. Mereka diharapkan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan rakyat. Aksi unjuk rasa "Indonesia Gelap" menyoroti berbagai tuntutan krusial, seperti penolakan efisiensi anggaran pendidikan, hak-hak dosen, peninjauan ulang program makan gratis, penolakan IUP di lingkungan kampus, serta kritik

terhadap revisi UU dan fungsi TNI/POLRI dalam sektor sipil. Meskipun sempat diwarnai kericuhan akibat respons yang kurang memuaskan dari pihak terkait, semangat kritis dan kepedulian mahasiswa tetap menonjol sebagai wujud tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi bangsa. Keseluruhan rangkaian aksi ini menggarisbawahi bahwa mahasiswa merupakan aset penting dan harapan bangsa di masa depan yang harus terus mengasah kepekaan terhadap krisis dan kemampuan memecahkan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grandmedia Utama Pustaka.
- Hayati, K. R., Utomo, D., Putro, R., Sekti, P., Hartono, A. F., Atthoriq, W., Saputra, E. V., Raya, J., Madya, R., Anyar, G., & Timur, J. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI. 2, 1-7.
- Juwita, M. (2022). Pentingnya Peran Mahasiswa dalam Bela Negara. *Core*, 1, 1-10. <https://osf.io/3edyq/>
- Lutfiana, R. F., & Widiyanto, A. A. (2018). Meruntuhkan Status Quo: Partisipasi Politik Dan Kekerasan Dalam Gerakan Mahasiswa Di Indonesia (Tinjauan Sosio-Historis). *Jurnal Civic Hukum*, 3(1), 92. <https://doi.org/10.22219/jch.v3i1.7731>
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71-84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- PRASETYA, A. (2019). Isu Gerakan Sosial Baru: Tempat Nasi Gratis Bandung. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 3(2), 54. <https://doi.org/10.24198/jsg.v3i2.21638>